

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies : Tarif MRT Rp 1.000 per Km

DPRD Ingin yang Disubsidi Hanya Warga Ber-KTP DKI

Palmerah, Warta Kota

Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase 1 rute Bundaran HI-Lebak Bulus bakal diresmikan Presiden Joko Widodo, Minggu 24 Maret 2019. Namun hingga Selasa (19/3) kemarin, tarifnya belum ditetapkan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku belum mendapatkan kepastian soal besaran tarif MRT, karena masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta.

"Untuk tarif sedang finalisasi di Dewan. Tapi arahnya nanti perhitungannya berbasis kilometer. Untuk rata-ratanya Rp 1.000 per kilometer. Tapi nanti tunggu ketok palu di Dewan dulu," kata Anies usai mendampingi Presiden Joko Widodo menjajal MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus, Selasa (19/3) siang.

Jika mengacu pada tarif tersebut, maka perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus ke

Bundaran HI atau sebaliknya sepanjang 16 kilometer akan dikenai tarif Rp16.000.

Dengan berbasis kilometer, kata Anies, tarif yang dikenakan tiap stasiun akan berbeda-beda. "Misal dari Blok M ke Setiabudi, itu tidak sama dengan ketika naik dari Blok M ke Stasiun HI. Jadi, tarifnya tidak flat ya," ujarnya.

Anies menyebut, berbagai persiapan telah dilakukan jelang pengoperasian MRT pekan depan, termasuk dengan fasilitas pendukung seperti parking ride dan sebagainya.

Dalam kesempatan mendampingi Presiden Jokowi kemarin, Anies juga sempat bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Usai bertemu Prasetyo, Anies memastikan tarif MRT akan disepakati sebelum MRT beroperasi komersial pekan depan.

"Tadi saya sudah ngomong juga dengan Pak Pras. Nanti Insyaallah diputuskan sebe-

lum 24 (Maret)," kata Anies.

Belum sepakat

Saat ini, jajaran Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta masih membahas soal tarif bersama Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta. Bahkan sudah beberapa kali Pemprov DKI dan anggota DPRD menggelar rapat untuk menetapkan tarif, namun belum juga ada kesepakatan.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran HI. Sedangkan untuk LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus mengge-lontorkan subsidi sebesar Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT yang diambil dari APBD DKI 2019.

Namun subsidi untuk MRT dan LRT itu harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Komisi B dan Komisi C DPRD DKI hingga saat ini masih membahas tarif tersebut.

Anda ingin
Mengomentari
berita ini? Silakan
like di Facebook
Wartakotalive



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies : Tarif MRT Rp 1.000 per Km

DPRD Ingin yang Disubsidi Hanya Warga Ber-KTP DKI

Pemborosan

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan perhitungan biaya operasional MRT yang disodorkan Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta kurang komprehensif dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

"Dulu kita mendapatkan kepastian informasi bahwa tarifnya hanya Rp 18.000, kita menyetujui. Ternyata sudah mau diluncurkan, tarifnya jadi Rp 31.000. Berarti kan naik hampir 70 persen tuh," ujar Santoso saat dihubungi, Selasa (19/3).

Ia juga mengatakan tarif Rp 31.000 per sekali jalan dengan pembagian masyarakat Rp 10.000 dan subsidi Rp 21.000 tidak masuk akal bahkan terkesan pemborosan.

"Rakyat hanya dibebankan Rp 10.000, DKI fix subsidi Rp 21.000. Kalau ada masyarakat naik dari Lebak Bulus ke Fatmawati, subsidiya juga Rp 21.000? Kan gak gitu. Saya melihatnya justru ada pemborosan," kata Santoso.

Ia pun melanjutkan, usulan Public Service Obligation (PSO) yang diajukan oleh Pemprov DKI masih tidak mempertimbangkan jarak dan hanya mematok di angka Rp 21.659 per penumpang atau Rp 672,38 miliar untuk tahun 2019.

Santoso mengatakan, pihaknya kini sedang mendorong Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta untuk mencari sumber pendapatan lain agar bisa mengurangi subsidi yang akan diberikan.

"Kita kepingin transparansi dari MRT. Soalnya di sepanjang koridor itu kan dipasang iklan. Di stasiun itu ada tempat orang berjualan, itu kan merupakan komponen pendapatan juga buat mereka. Nah mereka juga harus menghitung supaya subsidiya bisa dikurangi," ungkap Santoso.

Tepat sasaran

Terpisah, Komisi B DPRD DKI Jakarta ingin agar subsidi yang dialokasikan untuk tiket MRT dan LRT Jakarta bisa tepat sasaran. Karena itu, Komisi B mengusulkan hanya warga ber-KTP DKI Jakarta yang mendapatkan subsidi dari APBD DKI Jakarta itu.

"Kami ingin subsidi kita tepat sasaran, warga Jakarta tentunya," kata Ketua Komisi B Abdurrahman Suhaimi dalam rapat pembahasan tarif MRT dan LRT di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Anggota Komisi B lain, Ida

Mahmudah, menyampaikan hal serupa. Dia tidak ingin subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta sama seperti subsidi untuk transjakarta, dinikmati oleh warga luar Jakarta.

"Usulan saya, yang menikmati adalah warga Jakarta karena ada program JakLingko subsidiya sekian besar, tapi yang menikmati tidak hanya warga Jakarta, tapi juga Bekasi, Bogor, Depok," kata Ida.

Hitung lagi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta M Abbas mengemukakan, tim perumusan tarif MRT dan LRT Jakarta akan menghitung kembali komponen penghitungan tarif.

Tim perumusan tarif MRT dan LRT juga akan melihat kembali kajian yang telah dirumuskan sebelumnya.

"Setelah ini, kami mau utak-atik nih. Kami lihat apakah di kajian juga melihat pada statusnya (warga ber-KTP DKI atau bukan)," ucap Abbas.

Gabung 3 perusahaan

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta serius dalam menata sistem transportasi di ibukota. Dalam pengembangan sistem transportasi ke depan, Anies bilang akan terintegrasi dengan tata ruang.

"Mulai perencanaan hingga pengelolaan transportasi di Jabodetabek disambungkan

dengan tata ruang. Tadi Bapak Presiden menyatakan DKI punya fiskalnya untuk melakukan itu. Karena itulah beliau menugaskan kepada DKI untuk melakukan perencanaan bagi pembangunan semua infrastruktur transportasi sekaligus pengelolaannya. Pembangunannya sendiri akan dilakukan 10 tahun ke depan," ujar Anies usai mendampingi Presiden Jokowi kemarin.

Ia menjelaskan, untuk mewujudkan itu di Jakarta, dibutuhkan investasi sekitar Rp 571 triliun di sektor publik dan Rp 770 triliun untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dan lain-lain.

Terkait rencana itu, Anies bilang akan menggabungkan tiga perusahaan transportasi yang kini ada yakni MRT, Transjakarta dan Kereta Commuter Indonesia (KCI) ke dalam sebuah holding BUMD DKI Jakarta.

"Jakarta memang jadi prioritas dan pembangunan-pembangunan nanti akan dilakukan lewat BUMD supaya tidak terbatas oleh wilayah," kata Anies.

"Terkait penggabungan tiga perusahaan ke dalam satu holding, itu juga sekaligus agar pengaturan subsidi transportasi bagi masyarakat bisa menyatu dalam satu sistem yang terintegrasi, subsidi untuk semua moda. Kalau sekarang kan masih subsidi sendiri-sendiri," imbuh Anies. (fha/m16/Kompas.com)